

PENGETAHUAN TRADISIONAL NOMAD LAUT ASIA TENGGARA DAN TATA KELOLA EKOSISTEM PESISIR DAN KEPULAUAN

Henry Thomas Simarmata¹, Mia Gisella Kartika Pasaribu², Yohana Patricia³

Associated Program for International Law

Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Mahasiswa, Faculty of Law and Communication, Universitas Katolik Soegijapranata

henrythomas.apintl@ gmail.com, kartikagisella19@ gmail.com

Correspondence: kartikagisella19@ gmail.com

Abstrak

Nomad laut adalah komunitas yang hidup secara nomadik/semi-nomadik di kawasan Asia Tenggara. Pengetahuan tradisional mereka merupakan suatu kontribusi penting terhadap perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau di Asia Tenggara. Pengetahuan tradisional ini sebagian besar berupa pengetahuan intuitif dan tidak begitu saja dapat diterjemahkan dan diolah ke dalam suatu tata kelola. Upaya-upaya terbatas sudah dilakukan untuk mengambil-olah dan mengelola pengetahuan tradisional nomad laut ke dalam tata kelola. Tujuan studi dalam artikel ini adalah memberikan penggambaran potensi konflik antara sistem formal kenegaraan berhadapan dengan pengetahuan tradisional yang sebenarnya penting bagi nomad laut dan penting bagi pengelolaan ekosistem maritim secara keseluruhan. Dalam tujuan ini juga dimuat potensi dialog dan saling penguatan antara sistem formal dan pengetahuan tradisional. Tujuan Artikel ini didasarkan pada observasi terbatas dan riset yang sedang berkelanjutan dalam mengambil olah pengetahuan tradisional ke dalam tata kelola. Metode dalam artikel ini adalah studi norma, yaitu hukum dan pemerintahan internasional dan domestik, dan pada saat yang sama menggunakan kerangka etno-maritim terhadap nomad laut. Hasil dari studi adalah kontribusi studi terus-menerus terhadap pengelolaan ekosistem pesisir dan kepulauan dimana nomad laut menjadi pelaku penting.

Kata kunci: kerangka norma, nomad laut, pengetahuan tradisional, tata kelola

TRADITIONAL KNOWLEDGE OF SEA NOMADS OF SOUTHEAST ASIA AND GOVERNANCE ON COASTAL AND ISLANDS ECOSYSTEM

Henry Thomas Simarmata¹, Mia Gisella Kartika Pasaribu², Yohana Patricia³

Associated Program for International Law

Undergraduate, Fakultas Hukum, Christian University of Indonesia

Undergraduate, Faculty of Law and Communication, Soegijapranata Catholic University

henrythomas.apintl@ gmail.com, kartikagisella19@ gmail.com

Correspondence: henrythomas.apintl@ gmail.com

Abstract

Sea nomads are nomadic/semi-nomadic communities living in southeast asia. Their traditional knowledge is the key contribution to the protection of coastal and islands ecosystem in Southeast Asia. This traditional knowledge is largely intuitive and not readily rendered into scientific knowledge and governance. Limited efforts have been made to admit and manage sea nomads traditional knowledge into governance. Aim for the study in this artikel is to bring about a descriptive mapping on the conflict between formal state-system and/against traditional knowledge which are key part of survival of sea nomads. In this aim, a potential of dialogue

and mutual-empowerment will be drawn. This article is based on the scaled-observation and on ongoing research on traditional knowledge which acknowledged into a governance. The method in this study is a normative framework i.e. international and domestic law and governance while also making use the ethno-maritime look into sea nomads. The result is to contribute to the present and ongoing studies on governance of coastal and maritime in which sea nomads are key actor.

Key words: framework of norm, governance, traditional knowledge, sea nomads

Pendahuluan

Nomad laut sebagai subyek pengetahuan dan subyek hukum mendapatkan momentum ketika ruang maritim (“ruang pesisir, pulau-pulau, dan kelautan”) ditetapkan ke dalam satu formulasi, yaitu Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017. Pada saat yang sama, sea nomads atau nomad laut yang menjadi pelaku penting pengelolaan maritim Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebelum dan dalam era Republik Indonesia, tidak masuk atau tidak dibahas dalam Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam bagian 5 KKI yaitu mengenai “budaya bahari” titik tekan masih pada kewilayahan maritim dan pemanfaatan ruang maritim, dan belum mencapai bahasan mengenai komunitas-komunitas tradisi, termasuk di dalamnya nomad laut. Tujuan studi dalam artikel ini adalah memberikan penggambaran potensi konflik antara sistem formal kenegaraan berhadapan dengan pengetahuan tradisional yang sebenarnya penting bagi nomad laut dan penting bagi pengelolaan ekosistem maritim secara keseluruhan. Dalam tujuan ini juga dimuat potensi dialog dan saling penguatan antara sistem formal dan pengetahuan tradisional. Tujuan Artikel ini didasarkan pada observasi terbatas dan riset yang sedang berkelanjutan dalam mengambil olah pengetahuan tradisional ke dalam tata kelola.

Sea Nomads, atau yang ditransliterasikan sebagai nomad laut, adalah kelompok masyarakat yang berbasis pada ulayat, berpola nomadik/semi-nomadik, hidup dalam perlintasan perlintasan di berbagai kawasan ekosistem, pola nilai dan bahasa, maupun pola relasi internal dan eksternal. Nomad laut sepenuhnya mempunyai orientasi laut. Namun, pola hidup mereka mempunyai tiga ciri utama, yaitu (1) mereka yang sepenuhnya nomadik di laut, (2) hidup secara musim (*seasonal*) di laut dan di pulau, (3) hidup di pesisir namun perikehidupan sepenuhnya di laut. Di Indonesia, mereka dikenal dalam 2 pola besar, yaitu Orang Laut dan Sama-Bajau. Seringkali, istilah suku laut juga dipakai untuk menamai mereka. Keduanya ini mempunyai persamaan, sekaligus persamaan. Dalam hal ini, apapun yang mereka klaim mengenai sejarah mereka, pihak non-nomad laut perlu tetap menghargai klaim tersebut. Tugas ilmuwan, jurist, kelompok advokasi dan pengambil kebijakan, dengan ini, memperdalam pemahaman terhadap nomad laut dan memperkuat saling pengakuan terhadap, diantara, dan lintas nomad laut.

Artikel ini secara khusus memberikan perhatian pada dua karya akademik penting yaitu, Cynthia Chou (terutama Indonesian *Sea Nomads, Money, Magic, and Fear of the Orang Suku Laut*. Chou, 2003 [V.10](#)) dan kolaborasi Wengki Ariando, Dedi Supriadi Adhuri, Henry Thomas Simarmata, Narumon Arunotai [V.3 V.4 V.5 V.6 V.14](#)). Kedua karya ini merupakan karya yang secara berkelanjutan mengontruksikan *body of knowledge* mengenai nomad laut dan membangun metode etno-maritim yang secara unik memberikan perhatian dan pengakuan pada nomad laut. Namun, karya ilmiah penting mengenai nomad laut sudah cukup banyak meskipun sebenarnya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan studi etnografi atau normatif lain. Termasuk dalam karya ilmiah ini adalah Berenice Bellina et al., (eds.) *Sea Nomads of Southeast Asia, From the Past to Present* (Bellina, eds., 2021, [V.9](#)). Karya Bellina et al. adalah karya ensiklopedik dan multi-disipilin mengenai nomad laut Asia Tenggara. Perlu juga disebutkan bahwa Chandra Nuraini, seorang akademisi yang berasal dari komunitas nomad laut Sama-Bajau juga menyusun satu karya saintifik yaitu *The Intangible Legacy of the Indonesian Bajo*

(Nuraini, 2016 [V.12](#)) Sebagian karya-karya lain yang merupakan karya penting mengenai nomad laut ditampilkan dalam daftar pustaka.

Nomad laut merujuk pada kelompok sosial-kultural, atau komunitas, yang hidup berpindah-pindah di pesisir, pulau-pulau, dan laut lepas. Mereka bukan tipe masyarakat yang berwawasan dan berperikehidupan menetap secara permanen di suatu kawasan darat. Dalam pola hidup yang berpindah-pindah di laut, nomad laut bergantung sepenuhnya pada sumber daya perairan, serta memiliki hubungan spiritual yang erat dengan laut sebagai ruang hidup dan sumber pengetahuan. Pola hidup nomadik-semi nomadik ini juga berkorelasi dengan situasi ekosistem termasuk arah pergerakan ikan dan juga siklus iklim yang berpengaruh pada biota laut. Hal ini juga erat hubungannya dengan perikehidupan perikanan tangkap yang diwariskan dari satu ke generasi berikutnya. Nomad laut memiliki kepercayaan yang erat dengan laut. Kehidupan nomadik/semi-nomadik melahirkan identitas budaya yang khas, mulai dari bentuk pemukiman di atas perahu dan rumah panggung pesisir, sistem pengetahuan tradisional yang diwariskan secara lisan, hingga praktik ekonomi subsisten yang berfokus pada perikanan dan perdagangan hasil laut.

Dalam lingkup nomad laut terdapat Sama-Bajau. Beberapa literatur menyebutnya sebagai Sama-Bajau (atau Bajo). Sama-Bajau adalah kelompok etnis maritim yang dikenal sebagai nomad laut atau “pengembara laut” (*sea nomads*) dan tersebar di kawasan Asia Tenggara maritim terutama di Indonesia bagian timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku), Filipina selatan, dan pesisir Malaysia. Kelompok Bajau ini tinggal nomadik/semi-nomadik di beberapa tempat berbeda, seperti di atas rumah apung, di atas kapal (lepa) dan menetap pulau terpencil. Mata pencaharian mereka masih sangat didominasi oleh perikanan. Dengan demikian, dalam hal mata pencaharian, mereka bergantung pada sumber daya laut. Mereka aktif dalam pergerakan maritim dalam perikanan ikan di perairan yang jauh.

Komunitas Sama-Bajau sangat bergantung pada hasil laut, terutama dalam pengelolaan ekosistem yang seringkali dinilai tinggi oleh konsumen atau bagian masyarakat tertentu, seperti teripang (*sea cucumber*). Di kawasan Laut Timor (antara Nusa Tenggara Timur dan Australia Utara), Bajau kerap melakukan perjalanan jauh menggunakan perahu tradisional untuk berburu teripang yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional (terutama Tiongkok). Aktivitas ini seringkali bersifat lintas batas

Orang laut adalah nomad laut yang hidup di kawasan di sekitar Pantai Timur Sumatera, Gugus Kepulauan Riau, Gugus Kepulauan di Laut Cina Selatan. Di Thailand, mereka juga dikenal sebagai Urak Lawoi. Mereka juga hidup di jalur persebaran Orang Laut ini. Orang Laut hidup dengan orientasi laut yang sangat kuat, namun, sekaligus mempunyai perikehidupan dan pola tenurial pertanian dan kehutanan darat yang juga kuat. Kedua pengetahuan tradisional ini sangat berperan dalam menyumbangkan pemanfaatan lestari terhadap ekosistem di kawasan tersebut. Orang laut juga hidup di kawasan yang kaya mineral. Hal ini seringkali menempatkan mereka dalam situasi konflik berkepanjangan dengan kegiatan ekonomi ekstraktif skala besar yang meminggirkan Orang Laut.

Secara khusus, artikel ini perlu melakukan referensi kunci kepada 2 peneliti yang tergabung dalam SNCG (Sea Nomads Contact Group), dan secara sendiri-sendiri mewakili lembaga riset mereka masing-masing. Riset mengenai nomad laut, masyarakat pesisir dan jalur teripang (*sea cucumber*) nomad laut banyak dikelola dan dikembangkan oleh Dedi Supriadi Adhuri, yang juga merupakan peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Riset spesialis oleh Wengki Ariando, peneliti KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) nomad laut, di titik-titik penting di periran Asia Tenggara termasuk Wakatobi, Derawan, Sampoerna, Kepulauan Riau, pesisir timur Thailand dan titik penting lain. Selain kedua peneliti, artikel ini melakukan referensi kunci pada Narumon Arunotai, Andaman Pilot Project, Chulalongkorn University yang secara intensif melakukan kajian nomad laut di semenanjung Thailand. Bersama dengan

referensi kepada peneliti tersebut, artikel ini secara khusus mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan dari komunitas nomad laut dari berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Sama-Bajau di kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina dan Orang Laut di kawasan Selat Malaka dan Laut Jawa.

Metodologi

Fenomena masyarakat nomad laut (*sea nomads*) merupakan salah satu kajian menarik dalam antropologi maritim Asia Tenggara. Nomad laut mengolah pengetahuan tradisional yang berasal dan berproses bersama eksistensi mereka. Pengetahuan tradisional menjadi bagian dari kajian ilmu sosial khususnya sekarang yang dikenal sebagai etno-maritim. Pendekatan ini menempatkan identifikasi diri, nilai, pola hidup dan pengetahuan tradisional yang berdinamika bersama, dan seringkali identik dengan pola klimatik perairan laut. Pengetahuan tradisional dan pola kelola ini tidak terbatas pada kawasan perairan laut pelagis, melainkan juga perairan dalam dan kawasan samudera.

Pendekatan etno-maritim ini juga memberikan kajian dan pengakuan atas pola hidup nomadik dan semi-nomadik. Kekhasan ini menempatkan pergerakan menjadi suatu ulayat. Ulayat tidak dipahami sebagai sesuatu yang statik dan “mempunyai alamat”, namun suatu jalur gerakan yang luas dan mencakup beberapa kawasan ekosistem maritim sekaligus.

Pendekatan etno-maritim sebenarnya menggunakan formulasi dan penetapan variabel yang sama dengan etno-botani. Etno-botani telah terlebih dahulu dikenal. Pendekatan dan pengelolaan etno-botani dikenal dan dikembangkan terutama pada komunitas (hukum) adat dan komunitas tradisi di berbagai kawasan ekosistem. Etno-botani memberikan perhatian dan pengakuan hubungan antara hak dan ruang hidup komunitas dengan ekosistem dimana mereka hidup dan yang juga menjadi ruang budaya dan penghidupan mereka. Secara khusus, Indonesia memberikan pengakuan pada komunitas ini terutama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 95/PUU-XII/2014 yang merupakan *judicial review* Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan ini mengakui hubungan dan kesalingketergantungan antara komunitas dan ekosistem. Hal ini cukup menjadi terobosan karena, sebelumnya, cara pandang pemerintahan mengenai ekosistem, dalam hal ini kehutanan, yang mengelolanya sebagai “sumber daya” dan meminggirkan pola yang lain. “Pengakuan” terhadap komunitas tradisi ini menjangkau bukan hanya komunitas (hukum) adat, namun beragam komunitas yang hidup dan memanfaatkan tradisi mereka.

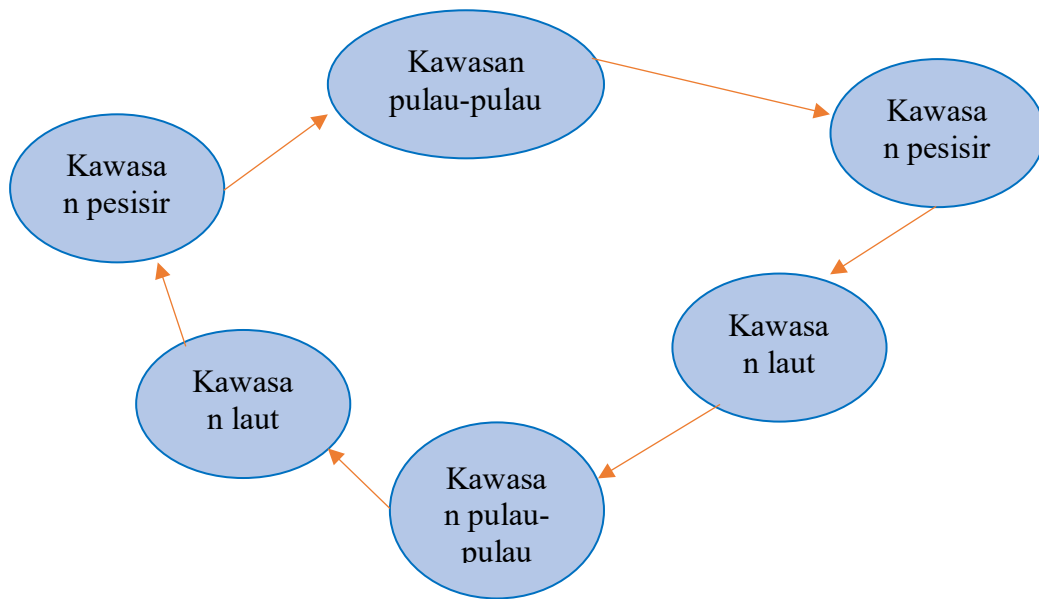
Etno-maritim, sama dengan etno-botani, memberikan perhatian dan pengakuan pada hubungan antara hak dan ruang hidup komunitas dengan ekosistem dimana mereka hidup dan mengidentifikasi diri mereka. Lebih jauh dari itu, etno-maritim komunitas maritim tetap memberikan perhatian dan pengakuan pada pola eksistensi dan hubungan antara hak dan ruang hidup komunitas dengan eksistensi, sekaligus memberikan perhatian dan pengakuan pada kawasan pesisir, pulau-pulau, dan laut yang saling terhubung (tidak monolitik, tidak terpisah satu dengan yang lain). Identifikasi etno-maritim membawa proses observasi pada situasi dan siklus ekosistem dan iklim yang seringkali jauh jaraknya dari komunitas dimana mereka hidup. Keterhubungan ekosistem ini juga menumbuhkan cara pandang dan pola hidup yang dekat pada ciri morfologi ekosistem tersebut.

Tabel 1

Lingkup bahasan dan analisa etno-botani, etno-maritim, etno-maritim nomadik

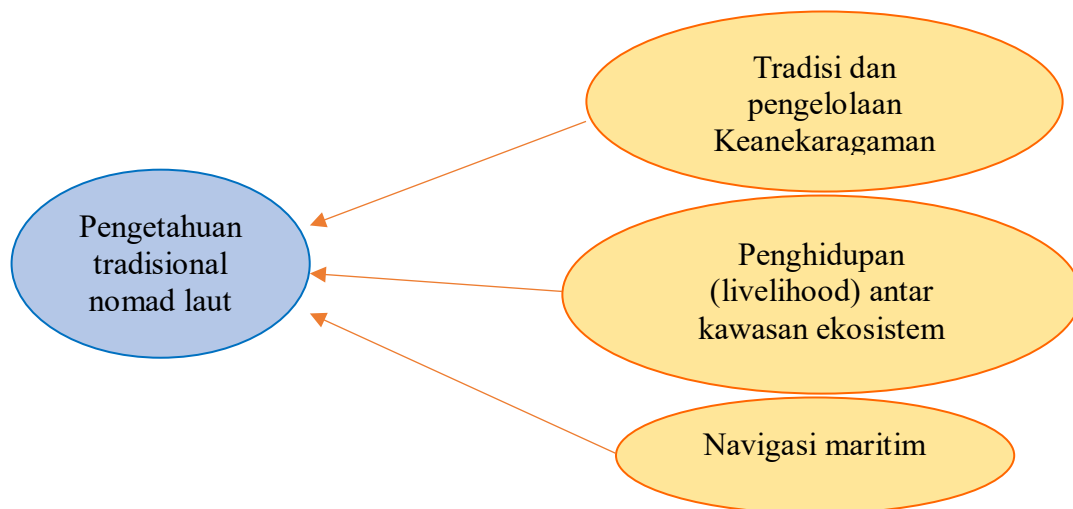
	Etno-botani (1)	Etno-maritim (2)	Etno-maritim/nomadik (3) Studi: chyntia chou (2003), Ariando-Adhuri-Simarmata, Narumon Arunotai (2023-present)
Hak dan ruang hidup (a)	ciri yang dianggap “budaya” atau “kearifan lokal” yang menjadi penanda hak dan ruang hidup (a,1)	Komunitas tradisi dan masyarakat umum yang hidup bersama (<i>co-existence</i>) dan memanfaatkan ruang maritim (a2)	Komunitas yang hidup secara nomadik atau semi nomadik dengan pola penghidupan dan pengetahuan tradisional nomadik/semi-nomadik antar kawasan-ekosistem maritim (a3)
Ekosistem (b)	Kawasan ekosistem yang dapat ditandai baik pada satu kawasan ekosistem maupun antar-kawasan ekosistem (b,1)	Ruang pesisir-pulau-pulau-kelautan yang menjadi penghubung antar ekosistem (b,2)	Kawasan ekosistem yang menjadi perlintasan ulayat yang berciri pesisir, pulau-pulau, hutan, kepulauan (b,3)

Metode etno-maritim yang dikembangkan oleh Chyntia Chou (Chou, 2003 [V.10](#)) memberikan perhatian pada pola perikehidupan nomadik/semi-nomadik nomad laut. Chou memberikan dasar-dasar observasi dan kajian terhadap komunitas laut. Eksistensi nomad laut diwujudkan dalam pola hidup nomadik di kawasan ekosistem maritim (pesisir, pulau-pulau, dan laut). Keduanya saling tergantung dan keduanya saling menguatkan.



Gambar 1
Metode etno maritim Chou mengenai pola hidup nomadik dari nomad laut

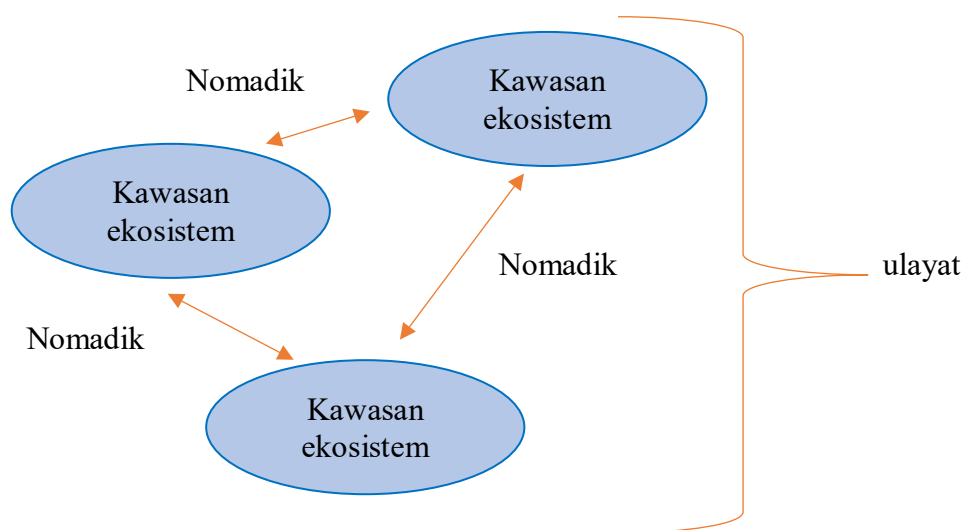
Metode etno-maritim Wengki Ariando (Ariando, 2019, [V.7](#) [V.15](#)) memberikan perhatian pada tradisi dan pola pengetahuan nomad laut yang merupakan refleksi langsung dari, sekaligus merupakan proyeksi terhadap kehidupan nomadik/semi-nomadik maritim. Metode ini mengolah “pengetahuan tradisional” sebagai inti dari eksistensi nomad laut.



Gambar 2
Metode etno maritim Ariando mengenai pengetahuan tradisional nomad laut

Metode etno-maritim Henry Thomas Simarmata, bersama dengan Wengki Ariando, Dedi Supriadi Adhuri, Narumon Arunotai (Simarmata, 2023 [V.14](#) dan Ariando et al. 2024 [V.5](#)) memberikan perhatian pada “ulayat”, yaitu pengetahuan, praktek hidup, nilai, inter-relasi dengan berbagai kelompok yang sepenuhnya berdasar pada perikehidupan nomadik/semi-nomadik. “Ulayat” ini bukan pertama-tama merupakan kawasan yang secara “sedenter” menjadi dasar tradisi dan praktek hidup sebagaimana biasanya kita pahami pada masyarakat adat, namun, “ulayat” dipahami sebagai identifikasi diri pada perlintasan antar kawasan

perikehidupan nomadik/semi-nomadik didasarkan padanya. “Ulayat” tidak dipahami sebagai “kepemilikan” melainkan pola nomadik kultural antar kawasan ekosistem.



Gambar 3

Metode etno maritim Simarmata (bersama dengan Adhuri, Ariando, Arunotai. mengenai ulayat nomad laut

Pendekatan etno-maritim menjadi sebuah rintisan baru pengetahuan, dan juga pola kelola yang mengakui pengetahuan tradisional maritim dan pola hidup nomadik/semi-nomadik sebagaimana yang dihidupi oleh nomad laut. Pendekatan ini melacak (*tracking*) pergerakan ini bukan sebagai halangan, atau masalah, melainkan “penyerbukan silang” pengetahuan tradisional dan pola kelola lestari terhadap kawasan ekosistem maritim (pesisir, pulau-pulau, ruang laut).

Secara sistemik, pola kelola kewarganegaraan dan/atau adminduk sangat bertumpu pada pola sedenter dan dengan batas-batas yang formal. Dalam situasi sekarang, sudah banyak pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan peneliti yang melakukan pengembangan pendekatan etno-maritim untuk memahami kawasan maritim Asia Tenggara yang luas dan kaya. Pengembangan ini juga berkontribusi pada dibangunnya membangun pola asimetrik terhadap kewarganegaraan dan/atau adminduk.

Hasil dan Pembahasan

Menilik sejarah, nomad laut memiliki peranan yang beragam. Mereka dapat berperan sebagai penjelajah, bahkan sebagai seorang pedagang. Mereka juga dikenal juga dengan julukannya sebagai seorang penjaga laut. Berbagai peranan mereka yang besar itulah yang kemudian mempengaruhi ekonomi serta politik di Asia Tenggara dalam beribu-ribu tahun lamanya. Kekayaan ini masih belum diakui dan dikelola dalam suatu negara modern.

Pengetahuan tradisional merupakan kekayaan yang tumbuh dari interaksi nomad laut dengan berbagai kelompok masyarakat dalam perlintasan nomadik/semi-nomadik mereka, dan dari pola hidup yang sangat dekat dengan siutasi atau ciri ekosistem maritim dimana mereka melintas dan menghidupinya. Pengetahuan tradisional ini kemudian juga dipahami dan diolah oleh berbagai kelompok masyarakat di luar nomad laut, dan juga dikelola untuk pemanfaatan dan penghidupan (*livelihood*) masyarakat tersebut.

Nomad laut yang dibahas dalam artikel ini adalah Sama-Bajau, Orang Laut, dan nomad laut secara umum yang hidup di kawasan Asia Tenggara.

Sama-Bajau

Keberadaan Sama-Bajau yang nomadik dan semi-nomadik seringkali tidak dapat dibakukan dalam suatu pola menetap atau pola registrasi yang biasa. Sama-Bajau dalam kehidupannya yang nomadik/semi-nomadik dan di dunia sisi yang berbeda, yakni laut dan daratan membangun pengetahuan tradisional mereka yang khas, yaitu orientasi laut yang sangat kuat.. Dalam hidup berdampingan dengan masyarakat luas, pengetahuan tradisional ini diwujudkan dalam pola interaksi yang dinamis. Sebagai salah satu contoh terdapat pada Pulau-pulau kecil di Taman Nasional Wakatobi (TNW) menjadi ruang sosial yang memperlihatkan terbentuknya relasi unik di antara komunitas lokal yang memiliki diferensiasi sosial-budaya. Secara umum, masyarakat TNW terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. kelompok masyarakat darat yang menetap di wilayah pulau, dengan mata pencaharian utama berupa berkebun, berdagang, serta melaut sebagai nelayan; dan
2. komunitas Sama Bajau yang bermukim di kawasan pesisir pulau-pulau kecil termasuk di TNW (Taman Nasional Wakatobi) dan di kawasan bersisian dengan TNW, membangun permukiman terapung di sekitar perairan Pulau Kaledupa, serta sebagian besar berprofesi sebagai nelayan pancing dasar maupun nelayan tuna di perairan Banda.

Keragaman identifikasi Sama-Bajau Wakatobi menekankan bagaimana identifikasi laut menjadi penentu. Daratan atau pulau dalam kawasan ekosistem yang mereka hidupi relevan sejauh memberikan kelengkapan atribusi. Suku Bajau Mola dan Suku Bajau Kaledupa misalnya menghidupi dua kawasan ekosistem, yaitu Mola dan Kaledupa, namun memahami laut sebagai identitas utama mereka. Bajau Mola adalah komunitas yang tinggal di Pulau Wangi-Wangi tinggal di atas air. Mereka membangun kampung terapung di pesisir dan perairan dangkal dekat pantai, dengan rumah-rumah panggung yang berdiri diatas tiang kayu. Mereka juga merupakan komunitas yang bergerak dari Mantigola (Kaledupa). Tinggal di kampung Mola, berprofesi sebagai nelayan dan pedagang hasil laut. Hubungan dengan orang darat Wanci Mandati cukup kuat secara ekonomi (pinjam-meminjam, perdagangan hasil laut), tetapi dengan orang Lia ada dinamika yang berbeda dimana ketegangan bisa timbul. Ciri dari Bajau Mola adalah lebih terbuka pada interaksi ekonomi dengan orang darat, meski konflik bisa muncul. Identitas nelayan sangat melekat. Sedangkan, Bajau Kaledupa adalah Komunitas Bajau tertua di Wakatobi, disebut juga sebagai kampung asal-usul (Mantigola). Ciri pola interaksi mereka lebih ke dalam keterikatan erat mereka dengan laut sebagai ruang hidup utama sekaligus sumber mata pencaharian. Aktivitas harian, mulai dari memperbaiki perahu, menjemur hasil tangkapan, hingga interaksi sosial masyarakat, berlangsung di atas air.

Kondisi di atas membedakan mereka secara jelas dengan masyarakat darat Mandati, Lia, maupun Waha yang menetap di wilayah daratan pulau dan mengandalkan pertanian, perdagangan, serta perikanan darat sebagai basis kehidupannya. Bajau Kaledupa, bermukim di wilayah pesisir dan sebagian rumah juga berada di perairan dangkal, tetapi tidak sepenuhnya membentuk kampung terapung seperti di Mola. Mereka cenderung lebih dekat dengan daratan Kaledupa, dan interaksi sehari-hari lebih sering terkait dengan orang darat di desa Horuo.



Gambar 4.
lepa Bajau. oleh Torben Venning - Bajau Laut Pictures, CC BY 2.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21546951>, dalam
Wikipedia

Kapal atau perahu menjadi elemen penting dalam kelompok nomad laut. Bagi komunitas Sama-Bajau, kapal atau perahu memiliki fungsi yang sangat vital dalam menunjang pola hidup maritim mereka. Kapal tidak hanya berperan sebagai sarana transportasi dan alat untuk menangkap ikan, tetapi juga sering menjadi hunian bergerak yang memungkinkan mereka bertahan hidup di laut dalam jangka waktu lama. Jenis kapal tradisional yang digunakan antara lain *jujungkoh*, *lelepa*, dan *bodi*, yang disesuaikan dengan kebutuhan melaut maupun aktivitas sehari-hari. Dalam struktur sosial-ekonomi, kapal berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil tangkapan sementara sebelum dibawa ke pasar atau ditukar dengan kebutuhan pokok. Lebih jauh lagi, kapal juga memiliki nilai simbolis sebagai representasi identitas Bajau sebagai nomad laut yang hidup mengikuti arus dan angin laut. Bahkan, dalam konteks arsitektur permukiman, kapal kerap dibongkar dan dimanfaatkan sebagai material bangunan rumah, pasar, maupun sekolah, sehingga memperlihatkan keterkaitan yang erat antara kapal, laut, dan kehidupan Bajau. Dengan demikian, kapal atau perahu bagi suku Bajau bukan sekadar alat, tetapi merupakan pusat kehidupan yang menyatukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual mereka.



Gambar 5.

Sampan-sampan tradisional Sama-Bajau (Sampan Kajang versi kecil) yang digunakan untuk aktivitas jarak dekat antar pulau, Jayabakti, Pagimana, Teluk Tomini Sulawesi Tenggara, (foto koleksi Henry Thomas Simarmata, 2024)



Gambar 6.

Replika tradisional Sampan Sama-Bajau, Jayabakti, Pagimana, Teluk Tomini Sulawesi Tenggara, (foto koleksi Henry Thomas Simarmata, 2024)

Namun tetap, bagi Sama-Bajau, kapal adalah ruang hidup sekaligus ekstensi mereka dalam perikanan tangkap (memancing), berpindah pulau, berdagang, dan berhubungan dengan keluarga lintas komunitas di berbagai kawasan pesisir dan pulau-pulau di Asia Tenggara. Ada ungkapan mereka: “*Tidak punya perahu sama dengan tidak punya tangan dan kaki*” (Nuraini 2016), yang menunjukkan betapa vitalnya perahu dalam hidup mereka. Mereka hidup nomadik penuh banyak hidup di kapal (perahu *kabang*) dan berpindah mengikuti musim.

Kehidupan atas Lepa/Kabang yang berpindah dan bergerak membuat mereka tidak dapat menyimpan barang berharga dalam waktu lama. Menurut Nuraini, Bajau hidup berpindah-pindah dengan perahu kecil dan di rumah panggung di atas laut, mereka tidak dapat menyimpan benda material yang besar atau permanen. Oleh sebab itu, warisan budaya mereka lebih bersifat tak benda (*intangible*) yakni berupa pengetahuan, tradisi lisan, musik, dan praktik ritual. Pengetahuan penting masyarakat Bajau adalah kemampuan para sandro untuk melindungi, mengobati, dan menyembuhkan, baik dari penyakit alami maupun gangguan supranatural. Ritual penyembuhan ini memadukan doa Islam dengan praktik tradisi, mencerminkan sinkretisme kepercayaan yang masih hidup di komunitas Bajau. Hal ini menunjukkan bahwa dalam internal suku bajau interaksi mereka sangat dekat, karena adanya kebutuhan untuk menurunkan warisan ini secara turun menurun dan berkelanjutan.

Dengan pola hidup nomadik/semi-nomadik ini, Sama-Bajau tidak terlepas dari berbagai isu, salah satunya mengenai lintas batasnya dalam laut. Bajau sering memasuki perairan Australia tanpa izin resmi untuk mencari teripang. Menurut hukum laut internasional ini merupakan bagian dari illegal fishing. Hal ini membuat adanya konflik pula dengan Australia yang menurut hukum nasional nya hal ini adalah pelanggaran. Sehingga, Banyak kasus penangkapan perahu-perahu Bajau oleh Australian Fisheries Management Authority (AFMA). Meskipun tindakannya atas dalih pengejaran terhadap hasil laut yang bernilai tinggi yakni teripang (*sea cucumber*) dan disamping gaya hidup yang berpindah-pindah di area laut, ini menjadi masalah lintas batas yang berbenturan dengan kebiasaan internasional.

Orang Laut

Di Kepulauan Riau, komunitas bagi nomad laut dikenal sebagai Orang Laut. Pegerakan Orang Laut diidentifikasi dari perlintasan kehidupan laut di kawasan Asia Tenggara termasuk di Kepulauan Riau dan pulau-pulau yang berdekatan dengan Semenanjung Thailand-Semenanjung Malaysia.. Pola hidup nomadik/semi-nomadik idnetik dengan sampan atau perahu yang sekaligus menjadi wujud pengetahuan tradisional mereka.



Gambar 7.

Sampan Kajang (Kabang), Koleksi Community Museum, Chao Lay, at Ban Sriboya, Lanta Old Town, Krabi, Thailand (foto koleksi Henry Thomas Simarmata, 2024)



Gambar 8.
Sampan Kajang (Kabang) Orang Laut Lingga (foto koleksi Wengki Ariando, 2024), diambil dari The Conversation, <https://theconversation.com/nasib-nomad-laut-gamang-di-laut-tumbang-di-darat-249407>

Pola hidup mereka berkelompok dan dipimpin oleh tetua yang dikenal sebagai Batin bersama dengan anggota kelompoknya yang berisikan satu keluarga di sampan kajang (atau yang disebut juga dengan kabang). Sampan kajang tidak hanya dijadikan sebagai sebuah tempat tinggal bagi orang laut, tetapi juga dijadikan sebagai alat transportasi. Di dalam sampan kajang tersebut juga tersimpan alat-alat seperti tombak, jaring, serampang, bahkan lembing yang digunakan mereka saat ke darat untuk melakukan perburuan. Bahkan di dalam sampan kajang juga terdapat hewan peliharaan seperti anjing yang digunakan orang laut sebagai teman mereka dalam melakukan perburuan. Hadirnya sampan kajang ini tentu menjadi sebuah poros bagi orang laut dalam menjalani aktivitas mereka sehari-hari.



Gambar 9.
Bubu, peralatan Orang Laut, dan Penyu sebagai penanda (Bahasa Jawa: têtêngêr) alur nomadik, koleksi Community Museum, Chao Lay, at Ban Sriboya, Lanta Old Town, Krabi, Thailand (foto koleksi Henry Thomas Simarmata, 2024)

Seiring dengan hadirnya berbagai negara modern dengan pemerintahan yang baru tentunya akan merubah nasib masyarakat yang tergabung ke dalam negara tersebut termasuk dengan apa yang terjadi kepada Orang Laut di daerah Kepulauan Riau yang mengubah Orang Laut yang pada awalnya hidup secara nomaden yang mengembara dengan menggunakan sampan mereka pada lautan bebas serta ekonomi mereka yang berjalan secara subsisten berubah menjadi sebuah krisis besar bagi kehidupan Orang Laut yang membawa mereka ke dalam sebuah paradoks sebagai manusia modern atau mempertahankan tradisi nenek moyangnya yang tentunya akan membawa sebuah konsekuensi serta dipenuhi berbagai keterbatasan. Perubahan sosial sangat terkait pola sedenter yang dipersyaratkan oleh hukum dan kebijakan yang sedenter dan statik.

Pemangku pemerintahan, pada suatu masa, menjalankan sebuah ‘pilot project’ program pemukiman kembali pada pertengahan tahun 1980-an. Program ini tentunya menjadi suatu megaprojek yang bekerjasama kepada pihak swasta dimana mereka akan melakukan kontrol terhadap pengubahan kekayaan alam dan pembangunan. Setelah 10 tahun projek ini dijalankan yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pengembangan terhadap beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura dalam pengembangan wilayah ekonomi. Tentunya hal tersebut berefek penuh pada kehidupan Orang Laut yang mengembara dan dengan terpaksa harus bermukim pada satu tempat yaitu Pulau Bentan yang memudahkan pemerintah untuk melakukan pengontrolan terhadap Orang Laut. Demikian juga pulau-pulau di kawasan perairan Sumatera-Semenanjung Thailand-Malaysia. Pola sedenterisasi ini juga berkontribusi pada hilangnya pengetahuan tradisional dan pola kelola yang sebenarnya sangat penting dalam membangun pemanfaatan lestari kawasan ekosistem maritim.

Di Indonesia, pola sedenterisasi ini mendapat respon yang kali ini mengakui kekhasan etno-maritim dan pola nomadik/semi-nomadik. Hadirlah satu-satunya rekognisi di Indonesia terhadap Orang Laut yang tinggal di Kepulauan Riau melalui Peraturan Bupati Lingga Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut Kabupaten Lingga dengan tujuan untuk melakukan pemberdayaan melalui berbagai kebijakan, program, serta kegiatan dalam melakukan peningkatan kesejahteraan mereka dengan melihat secara baik dan benar terhadap esensi serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh Masyarakat Suku Laut, sehingga kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan sampai dengan akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta pelayanan sosial pada Masyarakat Suku Laut dapat terpenuhi.

Sebagai perbandingan, nomad laut hidup Urak Lawoi yang hidup di pulau-pulau dan perairan laut yang berdekatan dengan semenanjung Thailand, hidup di laut sekaligus hidup di rumah yang tetap di kawasan pesisir. Pengakuan mereka, misalnya, adalah penetapan kawasan perlindungan budaya oleh negara Thailand.

Nomad Laut Asia Tenggara

Bagi nomad laut, laut bukanlah sekedar tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber daya dan sumber pengetahuan. Tidak hanya itu saja, nomad laut juga menganggap bahwa laut itu sendiri dihuni oleh roh-roh. Secara historis dapat dilihat bahwa nomad laut mempunyai peranan yang besar. Hal tersebut dapat dilihat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh nomad laut baik itu dalam bentuk perdagangan atau menjadi penjaga jalur-jalur perdagangan sampai pada pembentukan angkatan laut.

Nomad laut tersebar di wilayah Barat seperti Thailand dan Myanmar seperti di Kepulauan Mergui tersebut terkenal akan komunitas nomad laut yang dikenal sebagai Orang Moklen Thailand yang terkenal, Orang Moken, dan Urak Lawoi. Jumlah Urak Lawoi di Thailand berkisar 7.000 jiwa, Orang Moken/Moklen di Thailand berkisar 5.000 jiwa, Orang Laut yang berada di Myanmar berjumlah 4.000 jiwa, sedangkan Moken di Myanmar berjumlah 2.000 jiwa. Di daerah di antara Riau dan Sumatera yang dikenal dengan julukannya sebagai

Orang Laut dengan jumlah jiwa yang lebih banyak dibandingkan dengan pengembara laut yang berada di wilayah lain. Orang laut di Indonesia memiliki jumlah populasi 28.387 jiwa. Kemudian di antara Riau, Kepulauan Sulu, Kalimantan, dan Barat Laut Papua juga tersebar nomad laut tersebut.

Catatan terhadap perikehidupan nomad laut

Nomad laut memiliki perbedaan dari pengembala yang menetap di daerah daratan namun juga memiliki sebuah persamaan dengan pengembala dimana baik nomad laut dan pengembala di darat memiliki kehidupan yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Tidak hanya tersebar di Indonesia saja, namun pengembara laut juga tersebar di wilayah Asia Tenggara dimana nomad laut tetap aktif saat ini.

Persebaran dan pergerakan nomad laut ini seringkali bersifat lintas batas administrasi antar negara. Negara-negara terutama Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand sedang mengembangkan pola-pola pengakuan terbatas terhadap pola nomadik/semi-nomadik ini. Konflik yang seringkali timbul dalam hal ini adalah bahwa pola pengakuan ini sering memaksakan sedenterisasi atau pola adminduk yang kaku.

Nomad laut mengidentifikasi diri mereka sangat kuat pada laut dan pola nomadik/semi-nomadik. Hal ini masih perlu diadaptasi oleh negara modern. Adaptasi ini diperlukan untuk mengakui hak hidup mereka dan kontribusi penting mereka dalam pengelolaan kawasan maritim Asia Tenggara. Adaptasi juga diperlukan untuk mengembangkan pola hukum dan kebijakan yang *asimetrik* yang mengakui kekhasan sebagai kontribusi budaya maritim.



Gambar 10.

“Bubu” (*traditional fish trap*) Urak Lawoi (Chao Lay) di Toh Ba Liu, Koh Lanta, Krabi, Thailand (foto koleksi Henry Thomas Simarmata, 2024)



Gambar 11.
Replika “Bubu” yang dibuat oleh anak-anak sekolah dasar di sekolah Urak Lawoi bilingual (Bahasa Thai dan Bahasa Urak Lawoi), Koh Lanta, Krabi, Thailand (foto koleksi Henry Thomas Simarmata, 2024)

Kesimpulan

Pendekatan etnomaritim terhadap nomad laut didasarkan pada pengakuan hak hidup nomadik dari nomad laut termasuk dalam hal pengetahuan tradisional. Dari pendekatan ini tumbuh *body of knowledge* yang memberikan kontribusi besar pada pengelolaan kawasan ekosistem dan pola pemerintahan dan administrasi. Tentu saja, metode etno-maritim ini menyaratkan adanya partisipasi substantif dari nomad laut dalam mengelola pengetahuan tradisional mereka sendiri. Nomad laut harus mempunyai peran dan kemampuan pengambilan keputusan atas dirinya sendiri, dan dalam cara mana pengetahuan tradisional dan pola kelola nomadik/semi-nomadik maritim ditumbuhkembangkan dalam negara modern. Hal ini membutuhkan dialog terus menerus, dan juga membutuhkan kelola pengetahuan (*knowledge management*) yang semakin menguatkan hak hidup nomad laut di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Acciaioli, Greg, Brunt, Helen, Clifton, Julian (2017) *Foreigners Everywhere, Nationals Nowhere: Exclusion, Irregularity, and Invisibility of Stateless Bajau Laut in Eastern Sabah, Malaysia*, *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 15:3, 232-249, DOI: 10.1080/15562948.2017.1319526, <http://dx.doi.org/10.1080/15562948.2017.1319526>
- Adrianto, Luky (Ketua Kelompok Kerja), (2015). *Laporan Analisis dan Evaluasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia
- Ariando, Wengki, Adhuri, Dedi Supriadi, Simarmata, Henry Thomas (2025), Gamang di Laut, Tumbang di Darat: Marginalisasi Masyarakat Nomad Laut Indonesia, Korban Praktik Pembangunan Pesisir Eksploitatif, dalam Adhuri, Dedi Supriadi (Ed.) *Merampas Laut, Merampas Hidup Nelayan*. BRIN
- Ariando, Wengki, Adhuri, Dedi Supriadi, Simarmata, Henry Thomas (2025), Nasib Nomad Laut: Gamang di Laut, Tumbang di Darat. *The Conversation*, retrieved on 8 September 2025 from <https://theconversation.com/nasib-nomad-laut-gamang-di-laut-tumbang-di-darat-249407>
- Ariando, Wengki, Adhuri, Dedi Supriadi, Simarmata, Henry Thomas (2024), *First International Symposium of Sea Nomads in Southeast Asia*, SNCG (Sea Nomads Contact

- Group), with special advisor Narumon Arunotai, Andaman Pilot Project, Chulalongkorn University, co-hosted Kementerian Kebudayaan Indonesia, BRIN, Sea Nomads Contact Group, Andaman Pilot Project-Chulalongkorn University, KITLV, The Samdhana Institute
- Ariando, Wengki, Adhuri, Dedi Supriadi, Simarmata, Henry Thomas (2023) *The Transformations of Indonesian Sea Nomad: The Bajau*, Nomadic Ethics: Connecting Knowledge and Practices with Policy Advocacy, under leadership Narumon Arunotai, Andaman Pilot Project, Social Research Institute, Chulalongkorn University, 19 June 2023 & Panel Sea Nomads in SEA: Understanding Ethics and Cultural Relations Nomadic Ethics and Intercultural Dialogue Conference” organised by the IISNC, in collaboration with the Commission on Nomadic People, the National University of Mongolia, the Mongolian Anthropological Association, and UNESCO, Ulan Baatar 22-23 June 2023
- Ariando, Wengki, Limjirakan, Sangchan (2019) *Traditional Ecological Knowledge of Indonesian Sea Nomads “Orang Suku Laut” on Climate Change Adaption*. Proceeding on the 5th EnvironmentAsia International Conference, 13-15 June 2019, Chiang Mai, Thailand
https://www.researchgate.net/publication/333844860_Traditional_Ecological_Knowledge_of_Indonesian_Sea_Nomads_Orang_Suku_Laut_on_Climate_Change_Adaptation
- Ariando, Wengki, Taylor, Marcus, Adhuri, Dedi Supriadi, Simarmata, Henry Thomas (2023) *Towards Cultural Interconnectivity: A New Face of Social Networking of Bajau Communities* Nomadic Ethics: Connecting Knowledge and Practices with Policy Advocacy, under leadership Narumon Arunotai, Andaman Pilot Project, Social Research Institute, Chulalongkorn University, 19 June 2023 & Panel Sea Nomads in SEA: Understanding Ethics and Cultural Relations Nomadic Ethics and Intercultural Dialogue Conference” organised by the IISNC, in collaboration with the Commission on Nomadic People, the National University of Mongolia, the Mongolian Anthropological Association, and UNESCO, Ulan Baatar 22-23 June 2023
- Bellina, Berenice, Blench, Roger, Galipaud, Jean-Christophe (Eds) (2021), *Sea Nomads of Southeast Asia, From the Past to Present*. Singapore: NUS Press
- Chou, Cynthia (2003) *Indonesian Sea Nomads, Money, Magic, and Fear of the Orang Suku Laut*. London and New York: Routledge Curzon
- La Ola, Taane, Wianti, Nur Isiyana (2020), *Analisis Relasi Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil di Taman Nasional Wakatobi*. Jurnal Psikologi dan Pedesaan, Vol. 08 (01) 2020 | 30-46, DOI: 10.22500/8202028593
- Nuraini, Chandra (2016) *The Intangible Legacy of the Indonesian Bajo*. Wacana Vol. 17 No. 1 (2016): 1–18, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, DOI: 10.17510/wacana.v17i1.427
- Prawirosusanto, K. M. (2021). Mimpi kemakmuran dalam pemukiman: Kepenertiban dan perubahan sosio kultural orang suku laut di Kepulauan Riau. UGM Press.
- Simarmata, Henry Thomas, Adhuri, Dedi Supriadi, Ariando, Wengki (2023) *To claim or not to claim: cultural “ulayat” of Indonesian Sea Nomads*, Nomadic Ethics: Connecting Knowledge and Practices with Policy Advocacy, under leadership Narumon Arunotai, Social, Andaman Pilot Project, Research Institute, Chulalongkorn University, 19 June 2023 & Panel Sea Nomads in SEA: Understanding Ethics and Cultural Relations Nomadic Ethics and Intercultural Dialogue Conference” organised by the IISNC, in collaboration with the Commission on Nomadic People, the National University of Mongolia, the Mongolian Anthropological Association, and UNESCO, Ulan Baatar 22-23 June 2023

- Suhardiman, Diana, Ariando, Wengki, Adhuri, Dedi Supriadi, Indrabudi, Terry (2019) *Bakelam: Sea nomads' knowledge systems and potential building block for living with change*, Political Geography, Volume 119, 2025, 103335, ISSN 0962-6298, <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2025.103335>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629825000678>)
- Temu Raya Sama-Bajau 2024 (2024) *Deklarasi Temu Raya Sama-Bajau*, dalam <https://apintlaw.info>
- Westlund, Lena, Charles, Anthony, Garcia, Serge M., Sanders, Jessica (Eds.) (2017) *Marine protected areas: Interactions with fishery livelihoods and food security*. Food and Agriculture Organization.
- Wongbusarakum, S. (2007). *The Urak Lawoi' of the Adang Archipelago, Thailand*. UNESCO Bangkok: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and United Nations Development Programme (UNDP).
- Peraturan
- Peraturan Bupati Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut Kabupaten Lingga
- Peraturan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 4 Tahun 2022, tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017. Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)
- Deklarasi Wakatobi, GTRA Summit 2022, Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional), Republik Indonesia
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 95/PUU-XII/2014 yang merupakan *judicial review* Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Kertas Kerja dan presentasi konferensi 2022-sekarang
- Simarmata, Henry Thomas, Adhuri, Dedi Supriadi, Ariando, Wengki, Arunotai, Narumon, kajian nomad laut Asia Tenggara